



dppkb
LAMONGAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2021

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KAB. LAMONGAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dapat terselesaikan.

Tujuan disusunnya LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2021 masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan demi penyempurnaannya. Selanjutnya kami berharap bahwa LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2021 bisa dijadikan salah satu bahan evaluasi kinerja DPPKB Kabupaten Lamongan untuk perbaikan secara berkesinambungan sebagai ikhtiar meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Lamongan, Desember 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN

UMURONAH, S.ST, M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19721111 199203 2 010

Daftar Isi

Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	3
1.4 Sistematika Penyajian Lkjip	10
Bab II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	14
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	30
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	30
3.2 Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2020	38
Bab IV Penutup	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2021. LKjIP OPD Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP .

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Salah satunya adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan otonomi daerah Kabupaten dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan kemudian ditindaklanjuti dengan

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan tuntutan masyarakat yang kian hari semakin tinggi terhadap efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan, termasuk bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, telah membawa dampak bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yakni partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

Perencanaan sistem pencapaian kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang *starting point* pada arah dan kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) berdasar Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); serta Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614); dengan mensikapi paradigma yang berkembang selama ini, ternyata telah terjadi *gap* (kesenjangan) antara peran fasilitasi pemerintah dengan tuntutan masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan kesejahteraan. Indikasi kesenjangan tersebut nampak pada keterbatasan personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan yang dapat disediakan oleh pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2021 adalah untuk mengkomunikasikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan capaian kinerja program dan kegiatan selama satu tahun anggaran yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat (masyarakat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai selama tahun anggaran 2021;
2. Sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas dan fungsi DPPKB Kabupaten Lamongan
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja DPPKB Kabupaten Lamongan untuk perbaikan secara berkesinambungan sebagai ikhtiar meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur Pendukung tugas kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi, antara lain:

1. Perumusan Kebijakan Teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana daerah;
2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana daerah;

3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana daerah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

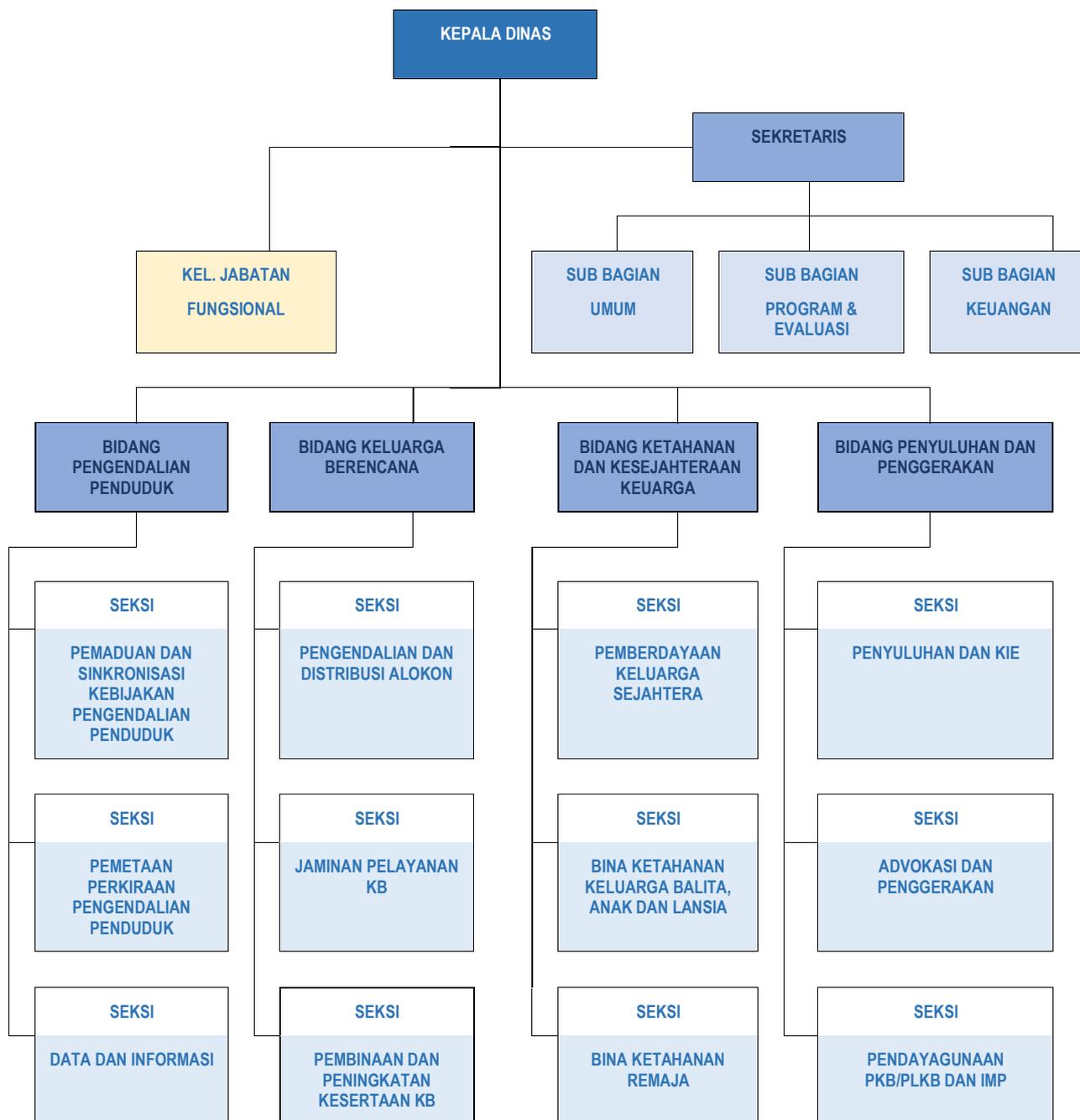
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dibantu oleh;

1. Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah;
 - b. Penyusunan rencana Program dan anggaran;
 - c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.
1. Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - b. Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sistem informasi keluarga;
 - d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten/ Kota;
 - f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
 - b. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;

- d. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten/ Kota;
 - e. Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten/ Kota;
 - f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten/ Kota;
 - g. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
 - h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana.
3. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten/ Kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/ PLKB);
 - e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas dibidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. Pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);
 - e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia;
 - f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga Sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - g. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN**



Perda Kab. Lamongan No. 05 Tahun 2016

1. Personil

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan didukung oleh 61 orang personil yang mempunyai latar belakang pendidikan mulai dari SMA sampai dengan Pasca Sarjana (S.2) sebagaimana tabel I sebagai berikut.

**Personil
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lamongan Tahun 2021**

NO	JABATAN STRUKTURAL	JMLH	PANGKAT/ GOLONGAN	JMLH	PENDIDIKAN FORMAL	JMLH	KET.
1.	Kepala Dinas	1	Pembina (IV/b)	1	S.2	1	
2.	Sekretaris	1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S.2	1	
3.	Kepala Bidang	4	Pembina (IV/a)	4	S.2	4	
4.	Kasubag	3	Pembina (IV/a)	1	S.2	1	
			Penata (III/c)	2	S.1	2	
5.	Kasi	12	Pembina (IV/a)	6	S.2	6	
			Penata Tk. I (III/d)	3	S.1	3	
			Penata (III/c)	1	D.2	1	
6.	Staf	38	Pembina (IV/a)	8	S.2	8	
			Penata Tk. I (III/d)	9	S.1	9	
			Penata Muda (III/a)	3	SMA	3	
			Pengatur Tk. I (II/d)	9	SMA	9	
			Pengatur (II/c)	13	SMA	13	
	Sub Jumlah	61		61		61	
	JUMLAH TOTAL	61		61		61	

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan tugas sehari-hari, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana tabel II, berikut ini :

Tabel II
Data Sarana dan Prasarana
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lamongan Tahun 2021

No	SKPD Jenis Sarana Prasarana	BARANG (Unit)		
		BAIK	Rusak Atau Tidak Dikuasai	JUMLAH
1	2	3	4	5=(3+4)
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Tanah	6		6
2	Roda 4 (Empat)	8		8
3	Gerobak Lori	1		1
4	Mesin Ketik Manual	4		4
5	Mesin Calculator	5		5
6	Lemari Besi/Metal	27		27
7	Rak Besi/ Metal	10		10
8	Rak Kayu	27		27
9	Filling Besi/ Metal	6		6
10	Band Kas	3		3
11	Papan Visuil	16		16
12	Papan Nama Instansi	25		25
13	Papan Pengumuman	1		1
14	Papan tulis	1		1
15	White Board	41		41
16	Peta	4		4
17	Overhead Projektor	1		1
18	Faximile	1		1
19	Layar LCD	1		1
20	Lemari Kayu	29		29
21	Lemari Arsip	6		6
22	Meja Kayu/ Rotan	3		3
23	Kursi Besi/ Metal	15		15
24	Kursi Kayu/ Rotan	20		20
25	Meja Rapat	24		24

26	Kursi Tamu	9		9
27	Kursi Puter	9		9
28	Kursi Kerja	24		24
29	Kursi Rapat	131		131
30	Meja Komputer	4		4
31	Sofa	21		21
32	Rak Buku	12		12
33	Jam Elektronik	5		5
34	Mesin Penghisap Debu	1		1
35	AC Split	10	-	10
36	Kipas Angin	22		22
37	Exhause fan	19		19
38	Treng Air	1		1
39	Radio	3		3
40	Amplifiler	1		1
41	Karaoke	1		1
42	Megaphone	1	-	1
43	Unit Power Supply	3	-	3
44	Timbangan Orang	1	-	1
45	Alat Hiasan	1		1
46	Lambang garuda pancasila	3	-	3
47	Gambar Presiden/ Wakil Presiden	3	-	3
48	Tiang Bendera	2		2
49	Water Filter	2	-	2
50	Tangga Aluminium	1	-	1
51	Dispenser	4	-	4
52	Alat Pemadam /Portble	6	-	6
53	Personal Komputer	40		40
54	Lap top/Note Book	31	-	31
55	Printer	66	-	66
56	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2		2
57	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9		9
58	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11		11
59	Meja Kerja Pegawai non Struktural	32		32
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2		2
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12		12
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10		10
63	Kursi Kerja Pegawai non Struktural	32		32

64	Buffet Kayu	1		1
65	Camera + attachmen	4		4
66	Proyektor + Attachmen	1		1
67	Microphone/ Wirelees Mic	30		30
68	Slide Proyektor	1		1
69	Handycam	1		1
70	Layar LCD	5		5
71	Rol Meter	1		1
72	Pesawat Telepon	8		8
73	Handy Talky (HT)	21		21
74	Bangunan Gedung	22	-	22
75	Jembatan	1		1
76	Instalasi	8		8
77	Jaringan	1		1
78	Buku Perpustakaan	1.960		1.960
79	Barang Bercorak Kebudayaan	13		13
80	Sepeda Motor			
JUMLAH		2.924	-	2.924

3. Pembiayaan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada urusan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 18.468.297.500,00 dan terealisasikan sebesar Rp. 16.024.937.579,00 atau 86.76 %.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

LKJIP OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2021 adalah instrumen yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan tentang uraian mengenai Latar Belakang, Maksud Dan Tujuan, Gambaran Umum Organisasi, dan Sistematikan penulisan,
2. **Bab II : Perencanaan dan perjanjian Kinerja**, bab ini memuat tentang; a) Rencana Strategis, yang terdiri dari : Visi,Misi,Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran serta Program dan Kegiatan. b) Rencana kinerja tahunan tahun 2021. c) Perjanjian kinerja tahun 2021.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, memuat tentang; a). Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020, b). Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021, c). Akuntabilitas Keuangan Tahun 2021.
4. **Bab IV : PENUTUP**

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Sebagai upaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan menyusun rencana strategi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD 2016 – 2021 serta berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat digambarkan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Kebijakan Dan Program yang ditetapkan dalam perencanaan strategi bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana yang diemban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Daerah Kabupaten Lamongan dan juga sebagai pendukung terwujudnya Visi tersebut yang selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan menetapkan Visi:

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “

Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kab. Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing, satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan, lebih sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal serta terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan

mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan Misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, mengikuti Misi Ke 5 (lima) dari RPJMD yaitu : **“Memantapkan Kehidupan Yang Tentram dan Damai dengan Menjunjung Tinggi Budaya Lokal”**.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk menetapkan tujuan, didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, hal ini dimaksudkan agar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mampu mencapai **tujuan dan sasaran**.

Adapun tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tujuan	Indikator
Meningkatkan Pelaksanaan KB Untuk Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

Sasaran adalah merupakan rangkaian capaian perencanaan strategik, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan Rencana Strategik (RENSTRA). Selaras dengan kebijakan dalam RPJMD, maka RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan menentukan Sasaran dan indikator kinerja sasaran yaitu :

Sasaran	Indikator
Meningkatkan Pelaksanaan KB Untuk Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Prevalansi Peserta KB Aktif
	Angka Lahir Kasar

Adapun keserasian program pada Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006 dengan Program di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 sehingga dapat diketahui capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Sasaran RPJMD 2016 – 2021	Anggaran Belanja Menurut Urusan Wajib Permendagri No.13 Tahun 2006	% Indikator Sasaran
1	2	3
Meningkatnya Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) Untuk Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Program Keluarga Berencana b. Program Penyuluhan dan Penggerakan c. Program Pembinaan Keluarga d. Program Pengendalian Penduduk	% Laju Pertumbuhan Penduduk

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan DPPKB memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai oleh DPPKB pada Tahun 2021, dengan harapan dapat

memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan *Good Governance* dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Lamongan.

Rencana Kinerja Tahunan dibuat agar suatu organisasi yang dalam hal ini DPPKB dapat mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat dilihat apabila kinerja dari organisasi tersebut dapat dicapai. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Untuk itu dalam Rencana Kinerja Tahunan, ditetapkan beberapa indikator kinerja untuk mengukur apakah kinerja Organisasi Perangkat Daerah tersebut dapat tercapai atau tidak. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dari tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan tahap setelah kegiatan selesai.

Indikator kinerja tersebut juga digunakan untuk meyakinkan bahwa terdapat kemajuan kinerja dalam rangka tercapainya Tujuan dan Sasaran DPPKB. Dalam penetapan indikator kinerja terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu : (a) spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi, (b) dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif, (c) menangani aspek-aspek yang relevan, harus penting atau dapat menunjukkan keberhasilan input, output, hasil atau outcome, manfaat ataupun dampak serta proses, (d) efektif, dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah dengan biaya yang tersedia.

Dalam Rencana Kinerja DPPKB terdapat dua macam indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu Indikator output dan indikator outcome. Dengan membandingkan keluaran/ output dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Indikator output dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefisi dengan baik dan terukur. Sedangkan Indikator Outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun output telah tercapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.

Untuk tercapainya semua tujuan dan sasaran yang sudah dituangkan pada ketentuan Renstra tahun 2016-2021, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan membuat kebijakan-kebijakan dan menyusun program kegiatan antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Program Pengendalian Penduduk
 - c. Program Program Pembinaan Keluarga Berencana
 - d. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
-
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator program IKM terdiri dari 5 Kegiatan antara lain:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Program Pengendalian Penduduk dengan indikator Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Penduduk yang ada dengan 2 Kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.
 3. Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan indikator program yaitu % Peserta KB MKJP dengan rincian Kegiatan antara lain:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/ Kota

- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pemilihan Kesertaan ber-KB
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yang memiliki 3 indikator program, % Anggota BKB, Yang Ber-KB; % Anggota UPPKS Yang Ber-Kb; % Anggota BKR Yang Ber-KB dengan kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Berikut akan disampaikan secara terlampir Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mendukung capaian Rencana Strategis 2021, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mengadakan perjanjian kinerja dengan Bapak Bupati Lamongan selaku Kepala Daerah Kabupaten Lamongan. Perjanjian Kinerja yang dimaksud merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bapak Bupati Lamongan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini disusun dengan tujuan :

- a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) Sebagai wujud nyata komitmen;
- c) Sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan dan sanksi;
- d) Dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e) Sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan/ sanksi;
- f) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan telah menyusun Perjanjian Kinerja secara hierarki dari Eselon II sampai dengan staf. Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Eselon II s.d. Eselon IV DPPKB Kab. Lamongan

No	Jabatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
1.	Kepala Dinas	Meminimalkan Kelahiran melalui Peningkatan Kesertaan ber-KB	Prevalensi Peserta KB Aktif	77,78 %	Program Pembinaan Keluarga Berencana	10.000.051.000,00
			Angka Lahir Kasar	10,16	Program Pengendalian Penduduk	100.000.000,00
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	979.037.000,00
2.	Sekretaris Dinas	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu	7 Dokumen	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Dokumen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.535.066.294,00



		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai IKM	78 %	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.452.100,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	614.595.000,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.171.300,00
3.	Kabid Keluarga Berencana	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB MKJP	22,50 %	Program Keluarga Berencana	10.000.051.000,00
5.	Kabid Pengendalian Penduduk	Membuat parameter analisis dampak kependudukan dan menyediakan data informasi terkait informasi keluarga dan kependudukan yang digunakan oleh pemerintah sebagai dasar penetapan kebijakan, dan	Jumlah Dokumen Analisis Kebijakan Kependudukan Yang Dihasilkan	1 Dokumen	Program Pengendalian Penduduk	100.000.000,00



		penyelenggara n pembangunan				
6.	Kabid Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Pembangunan Keluarga dalam menjalankan fungsi keluarga	Persentase Anggota BKB yang ber-KB	80,74 %	Program Pembinaan Keluarga	979.037.000,00
			Persentase Anggota UPPKS yang ber-KB	76,25 %		
			Persentase Anggota BKR yang ber-KB	75,66 %		
7.	Kasubbag Umum	Tersedianya jasa perkantoran	Persentase Jasa Perkantoran Yang Terpenuhi	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	541.595.000,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.660.700,00
					Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	30.548.000,00
					Pengadaan Perlengkap an dan Peralatan Kantor	37.807.800,00



		Memelihara Sarana Prasarana Aparatur Kantor	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	100%	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	33.364.400,00
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	49.727.400,00
8.	Kasubag Keuangan	Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan	Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000,00
		Terpenuhinya Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	Persentase SPP Yang Dicairkan ke BPKAD	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.505.066.294,00
9.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu	% Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00

			Kinerja OPD tepat waktu		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00
10.	Kasi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB	Meningkatkan Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	Persentase peserta KB yang berhenti dari keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (Drop Out)	12%	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.385.095.600,00
					Peningkatan Kesertaan KB Pria	10.000.000,00
					Penguatan Peran Serta Ormasy dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	20.000.000,00
11.	Kasi Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana	Peningkatan Intensitas Pelayanan KB Secara Statis di Wilayah Perkotaan, dan Pelayanan KB Secara Mobile di Pedesaan	Persentase PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (UNMEET NEED)	7,43 %	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.184.500,00
					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka	0

					Panjang (MKJP)	
					Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	10.000.000,00
12.	Kasi Pengendalian dan Distribusi Alkon	Penyediaan Sarana dan Prasarana Serta Alat Kontrasepsi Yang Memadai di Setiap Faskes KB	Persentase Jumlah Faskes Yang Menerima Alkon	100%	Pengendalian Pendistribusi-an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	140.458.000,00
					Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.184.500.000,00
13.	Kasi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Meningkatkan Kapasitas Tenaga Lapangan dan Kader dalam Hal Penyuluhan	Rata-rata Penyuluhan Yang Dilakukan oleh PKB/PLKB per bulan	12 kali	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	2.005.525.000,00
					Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	500.000.000,00
					Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerak-an, Pelayanan	15.000.000,00

					dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.301.394.400,00
14.	Kasi Penyuluhan dan KIE	Meningkatkan Penyuluhan Tentang KB dan Kecukupan Sarana Prasarana KIE	Persentase Kader yang memperoleh informasi dan edukasi untuk menjadi konselor KB	65%	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	10.000.000,00
			Persentase Media KIE yang tersedia sesuai kebutuhan	87%	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	165.322.000,00
					Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	12.120.000,00

15.	Kasi Advokasi dan Penggerak	Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Mitra Kerja KB dalam Pemahaman Masyarakat Terkait Program KB	Rasio Mitra Kerja KB yang Mendapat Advokasi dan Penggerakan Program KB	5,8%	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.653.000,00
16.	Kasi Data dan Informasi	Penyediaan Data Informasi Program KKBPK dan Penyediaan data pelayanan peserta kb baru dan peserta kb aktif	Persentase kebutuhan Data Informasi Program Kependudukan Keluarga Berencana & Pembangunan Keluarga yang tersedia Akurat dan Tepat Waktu	100%	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	20.000.000,00
			Persentase data pelayanan peserta kb baru yang tersedia	100%	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	0
17.	Kasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Lintas Sektor yang Telah Terintegrasi dengan Program Kependudukan, Keluarga	43,5%	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap	0

			Berencana dan Pembangunan Keluarga		Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	
			Persentase Kampung KB yang telah mendapat Pembinaan	35%		
			Persentase Kampung KB Yang telah terbentuk	80%	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendaftaran Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	0
					Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	10.000.000,00
					Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan	40.0000.0000,00

					Masyarakat	
					Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	0
18.	Kasi Pemetaan dan Perkiraan	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan berwawasan berkedudukan	Persentase kerjasama mitra lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kependudukan	45%	Perumusan Parameter Kependudukan	10.000.000,00
			Persentase terbentuknya pojok kependudukan	76%	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	10.000.000,00
					Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	10.000.000,00
19.	Kasi Bina Ketahanan Keluarga	Meningkatkan Peran Orangtua Mengenai Pentingnya Keluarga dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	31	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,	47.000.000,00



					Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	
					Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UP PKS)	0
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan	0

					Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
20.	Kasi Bina Ketahanan Remaja	Meningkatkan Fungsi dan Peran Kegiatan Kelompok BKR Sebagai Wahana untuk Meningkatkan Kepedulian Keluarga dan Pengasuhan Kepada Anak-Anak Remaja Mereka	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya dibawah 20 tahun	13,1%	Penyediaan Sarana Media Lini Lapangan Bina Keluarga	27.500.000,00
21.	Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Keluarga Baik Pus Yang Sudah Ber-KB Maupun yang Belum Ber-KB	Persentase Kelompok UPPKS yang memanfaatkan ATTG untuk berwirausaha	6,14%	Pelatihan Teknis Ketrampilan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	0

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan adalah perwujudan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada Bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100 %	Baik sekali (BS)
2.	Lebih dari 75 % s.d 100 %	Baik (B)
3.	55 % s.d 75 %	Cukup C
4.	Kurang dari 55	Kurang (K)

1. Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi dan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Adapun analisis capaian kinerja tersebut perlu dilakukan dengan cermat, agar dapat diketahui bersama apakah setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan sudah tercapai dengan baik, ataukah masih ada kekurangan dalam perencanaan atau pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah sehingga perlu dilakukan berbagai perbaikan.

Tabel 3.1
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
PADA DPPKB KAB. LAMONGAN

No	Sasaran	No	Indikator	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meminimalkan Kelahiran Melalui Peningkatan Kesertaan Ber-KB	1.	Prevalensi Peserta KB Aktif	77,78%	79,07%	101,66 %
		2.	Angka Lahir Kasar	10,11	8,34	121,22%

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (2016-2021). Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari semua indikator kinerja utama dapat mencapai target yang telah ditentukan dalam kategori capaian "**Baik Sekali**".

2. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/ RENSTRA

Untuk mewujudkan Misi ke-lima dalam RPJMD Kabupaten Lamongan (2016-2021) yaitu "Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal", ditetapkan tujuan yaitu " Meningkatkan Pelaksanaan KB Untuk Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)".

Untuk dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan damai dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya aspek kependudukan yang dalam hal ini lebih pada pengendalian jumlah penduduk.

Apabila jumlah penduduk dalam suatu daerah tidak dapat dikendalikan dengan baik, secara langsung atau tidak langsung dapat memicu kepadatan penduduk, kesenjangan pendidikan, pengangguran, kriminalitas, dan pengurangan kemiskinan. Untuk dapat mengukur pertumbuhan penduduk dalam suatu daerah dapat diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi			2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelaksanaan Keluarga Berencana Untuk Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,88	0,47	0,67	0,66	0,66	0,65	0,02	0,88	0,45	0,65	0,037	1.756%

Dari tabel 3.2 tersebut diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk yang pada akhir Tahun 2021 mencapai 0,07 % sehingga tidak memenuhi target sebesar 0,65 %.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Pada Tahun 2021

Penyebab keberhasilan tercapainya target LPP Pada Tahun 2021 dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :

1. Penguatan akses pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang merata dan berkualitas

Dengan adanya Sistem Jaminan Sosial Kesehatan (SJSN), maka telah ditetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan KB diantaranya standar pelayanan KB, mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM, menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan KB di seluruh Kabupaten Lamongan yang telah mencapai 58 Faskes KB, serta manajemen ketersediaan dan distribusi alat obat kontrasepsi (alokon).

Dengan dukungan anggaran yang ada terdapat peningkatan Pembinaan peserta KB, baik menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) maupun Non-MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksinya (rasional, efektif, dan efisien), dan peningkatan penanganan KB secara persalinan

2. Peningkatan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam penyiapan kehidupan berkeluarga.

Peningkatan peran mitra kerja secara terpadu dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, toga/toma, sekolah dengan memperhatikan kearifan lokal, perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi dan pernikahan usia anak.

3. Peningkatan pelaksanaan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang Pembangunan Keluarga Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

Penguatan advokasi dan KIE untuk terus melaksanakan sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana baik melalui pendekatan Media KIE maupun Media Sosial yang sesuai dengan kearifan budaya lokal. Pertemuan dengan awak media (jurnalis) dalam rangka rilis berita dan informasi terkait Program Bangga Kencana yang dilaksanakan secara berkala, baik melalui media cetak, media televisi, maupun siaran radio. Selain itu dengan adanya Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN) yang masih dimanfaatkan dengan baik, terutama di masa pandemi, dimana

masyarakat membatasi diri untuk mengikuti pertemuan, sehingga MUPEN ini masih bisa secara berkeliling untuk memberikan informasi terkait Program Bangga Kencana.

Selain pengukuran capaian indikator kinerja OPD yang ada di RPJMD di Tahun 2021, selanjutnya dilakukan juga pengukuran kinerja indikator kinerja yang telah ditetapkan di RENSTRA DPPKB Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 serta analisis dari capaian kinerja dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Tahun 2021, sebagaimana tabel berikut ini :

No	Sasaran	No	Indikator	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meminimalkan Kelahiran Melalui Peningkatan Kesertaan Ber-KB	1.	Prevalensi Peserta KB Aktif	77,78%	79,07%	101,66%
		2.	Angka Lahir Kasar	10,11	8,34	121,22%

Untuk mewujudkan Sasaran DPPKB Kabupaten Lamongan yaitu Meminimalkan Kelahiran melalui peningkatan kersertaan ber-KB diperlukan dua indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan capaiannya. Dua indikator tersebut masing-masing didukung oleh dua program teknis.

Berikut ini adalah uraian capaian indikator kinerja utama yang terkait urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yaitu :

- a. Prevalensi peserta KB aktif, realisasi indikator ini pada tahun 2021 sebesar 79,07 % dari target 77,77% yang ditetapkan, tercapai 101,66 % dengan kategori **Baik Sekali**. Indikator kinerja utama ini didukung oleh dua program teknis yaitu Program Keluarga Berencana dan Program Pembinaan Keluarga, adapun indikator kinerja ini didukung oleh 8 Kegiatan. Capaian indikator yang sangat baik ini disebabkan karena maksimalnya pelayanan kontrasepsi dan KIE yang dilakukan baik pelayanan yang dilaksanakan di Faskes KB atau dilaksanakan secara keliling. Pembinaan ketahanan keluarga yang dilakukan oleh kader Tribina juga turut mendukung tercapainya keluarga kecil sejahtera. Melalui setiap pembinaannya, program pembinaan keluarga selalu mengajak anggotanya agar turut aktif menyuarakan ajakan masyarakat sekitar mereka untuk menjadi peserta kb aktif.

- b. Angka Lahir Kasar, realisasi indikator ini pada Tahun 2021 sebesar 8,34 dari target yang ditetapkan sebanyak 10,16, tercapai 121,22 % dengan kategori **Baik Sekali**. Pencapaian indikator ini didukung oleh dua program teknis yaitu Program Pengendalian Penduduk dan Program Penyuluhan Penggerakan. Adapun indikator ini didukung oleh 10 Kegiatan. Pelaksanaan program Penyuluhan Penggerakan yang melibatkan dan memberdayakan PKB/PLKB, kader dan mitra kerja untuk melakukan penyuluhan dan penggerakan agar semakin banyak masyarakat yang memahami dan berpartisipasi dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sedangkan program Pengendalian Penduduk memberikan peran yang cukup baik dalam pengendalian angka kelahiran. Melalui program pengendalian penduduk, masyarakat dapat lebih memahami tentang pengetahuan kependudukan sehingga dapat lebih berpartisipasi dalam pengendalian penduduk sesuai dengan peran nya masing-masing.

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM, Dana dan Sarana dan Prasarana).

Untuk mendukung upaya peningkatan partisipasi KB Aktif dan penurunan kelahiran di Kabupaten Lamongan, diperlukan berbagai dukungan sumber daya baik SDM, Dana maupun Sarana Prasarana. Dalam hal penggunaan Sumber Daya Manusia, untuk mewujudkan target urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diperlukan adanya dukungan Penyuluh Keluarga Berencana yang mencukupi. Sebagaimana jumlah desa di Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 474 Desa, maka idealnya diperlukan 1 Penyuluh Keluarga Berencana untuk 1 Desa. Hal ini tentu berbanding jauh dengan kondisi *real* saat ini dimana DPPKB Kabupaten Lamongan hanya memiliki 82 Penyuluh Keluarga Berencana. Sehingga masih begitu banyak kekurangan Penyuluh Keluarga Berencana. Solusi yang saat ini masih bisa dilakukan adalah dengan memberdayakan PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana desa) atau Sub PPKBD dengan memberikan operasional bagi penyuluhan yang mereka laksanakan.

Untuk dukungan sarana dan prasarana di DPPKB Kabupaten Lamongan sudah cukup memadai, diantaranya sejumlah mobil operasional yang sudah diadakan baik dengan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi

Khusus (DAK) maupun yang diadakan dengan dana daerah APBD. Segala dukungan sarana prasarana telah diupayakan agar dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan demi mewujudkan pencapaian sasaran strategis DPPKB Kabupaten Lamongan yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik RPJMD, RENSTRA OPD maupun RENJA DPPKB Kabupaten Lamongan.

Terkait dukungan dana yang telah dianggarkan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan DPPKB Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021, seperti yang telah disampaikan sebelumnya diatas bahwa sumberdaya dana yang tersedia sebesar Rp. 18.468.372.694,00 sedangkan total dana yang terealisasi sebesar Rp. 16.024.937.579,00 sisa dana sebesar Rp. 2.443.435.115,00 yang merupakan SILPA di Kas Daerah.

Selanjutnya, agar diketahui seberapa efektifnya efisiensi anggaran yang sudah dilakukan, berikut ini disampaikan Tabel yang memuat data terkait penggunaan anggaran DPPKB Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2021.

TABEL. 3.3.1
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meminimalkan Kelahiran Melalui Peningkatan Kesertaan Ber-KB	Prevalensi Peserta KB Aktif	10.000.051.000	7.956.611.486	79,57%
	Angka Lahir Kasar	1.079.037.000	1.077.566.825	99,86%

**TABEL. 3.3.2
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Sasaran	Indikator	%Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	%Tingkat Efisiensi
Meminimalkan Kelahiran Melalui Peningkatan Kesertaan Ber-KB	Prevalensi Peserta KB Aktif	101,66%	79,57%	22,09%
	Angka Lahir Kasar	121,22%	99,86%	21,36%

Dari Tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan telah dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi dan tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan pada tahun 2021. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa selama Tahun 2021 telah dilakukan Refocusing Anggaran karena dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Sehingga terdapat beberapa kegiatan yang terpaksa tidak bisa dilaksanakan, karena terbatasnya anggaran.

Namun seluruh bagian dari perangkat daerah tetap bekerja keras dan tidak berputus asa walaupun anggaran yang tersedia terbatas, sehingga telah dilakukan berbagai strategi dalam refocusing anggaran agar program dan kegiatan dapat terus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin selama masa pandemic covid-19.

5. Analisa Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan kinerja

No	Program	No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Keluarga Berencana	1.	Persentase KB MKJP	22,50%	22,62%	100,53%
2.	Program Pembinaan Keluarga	1.	Persentase Anggota BKB Yang ber-KB	80,73%	86,07%	108,22%
		2.	Persentase Anggota UPPKS yang ber-KB	75,65%	91,27%	120,65%
		3	Persentase Anggota BKR Yang Ber-KB	75,65%	90,09%	119,08%
3.	Program Penyuluhan Dan Penggerakan	.1.	Persentase Institusi Masyarakat Pedesaan Mandiri	58,22%	63,56%	109,17%
4.	Program Pengendalian Penduduk	1.	Jumlah Dokumen Kebijakan Kependudukan Yang Dihasilkan	1	1	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI KINERJA TH. 2021	REALISASI KINERJA TH. 2020
1	Meminimalkan Kelahiran Melalui Peningkatan Kesertaan Ber-KB	Prevalensi Peserta KB Aktif	77,78%	79,07%	79,30%
		Angka Lahir Kasar	10,11%	8,34%	9,91%
NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI KINERJA TH. 2021	REALISASI KINERJA TH. 2020
1.	Program Keluarga Berencana	Persentase KB MKJP	22,50%	22,62%	21,20%
2.	Program Pembinaan Keluarga	Persentase Anggota BKB Yang Ber-KB	80,73%	87,37%	87,02%
		Persentase Anggota UPPKS Yang Ber-KB	76,23%	112,90%	88,48%
		Persentase Anggota BKR Yang Ber-KB	75,65%	91,27%	90,09%
3.	Program Penyuluhan dan Penggerakan	Persentase Institusi Masyarakat Pedesaan Yang Mandiri	58,22 %	63,56%	64,77%
4.	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah Analisa Kependudukan Yang Dihasilkan	1	1	1

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Program yang mendukung sasaran Renstra DPPKB Kabupaten Lamongan dapat dianalisis sebagai berikut :

Untuk Kelahiran sendiri dari sisi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Prevalensi peserta KB aktif sampai dengan tahun 2021 tercapai 101,66 % dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena maksimalnya PPKBD dan Sub PPKBD serta PKB/PLKB dalam memberikan Informasi tentang pentingnya Penggunaan alat kontrasepsi dan pentingnya membina keluarga kecil yang berkualitas.

- b. Angka Lahir Kasar s.d Tahun 2021 tercapai sebesar 8,34 dari target 10,11. Hal ini menunjukkan bahwa kelahiran di Kabupaten Lamongan sudah bisa dikendalikan dengan baik.
- c. Persentase KB MKJP s.d Tahun 2021 tercapai sebesar 22,62 % dari target yang ditetapkan yaitu 22,50%, hal ini disebabkan karena maksimalnya pelayanan KB khususnya Metode jangka panjang di fasilitas kesehatan, Bidan Desa serta melalui Mobil Pelayanan (Muyan) untuk melayani PUS yang ber KB tidak terpenuhi.
- d. Persentase Anggota Kelompok BKB yang ber-KB tercapai 87,37 %, hal ini didukung dengan pembinaan yang berkelanjutan pada pertemuan kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) baik yang dilaksanakan di posyandu maupun pada Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan yang khusus dilaksanakan untuk meningkatkan Ketahanan keluarga pada bidang Balita sekaligus juga untuk mengarahkan keluarga Anggota BKB untuk aktif mengikuti Program KB.
- e. Persentase Anggota Kelompok UPPKS yang ber-KB tercapai 86,07 %, hal ini didukung dengan pembinaan yang berkelanjutan pada pertemuan kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) baik yang dilaksanakan pada pertemuan di Pusyangatra (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) maupun pada Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan yang khusus dilaksanakan untuk meningkatkan Ketahanan keluarga pada bidang Pemberdayaan Ekonomi sekaligus juga untuk mengarahkan keluarga Anggota UPPKS untuk aktif mengikuti Program KB.
- f. Persentase Anggota Kelompok BKR yang ber-KB tercapai 91,27%, hal ini didukung dengan pembinaan yang berkelanjutan pada pertemuan kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) baik yang dilaksanakan di event Pramuka atau Saka Kencana maupun pada Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan yang khusus dilaksanakan untuk meningkatkan Ketahanan keluarga pada bidang Remaja sekaligus juga untuk mengarahkan keluarga Anggota BKR untuk aktif mengikuti Program KB.
- g. Institusi Masyarakat Pedesaan pada tahun 2021 tercapai sebesar 63,56% dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena Peran Enam Bhakti telah dilaksanakan serta Pelayanan KB/KS dan upaya kemandirian telah berjalan sesuai dengan harapan.

- h. Analisis Dokumen Kebijakan Kependudukan yang dihasilkan telah terca4ai sebesar 100 % dari target yang ditetapkan, karena Jumlah Analisis Kependudukan dibuat untuk menentukan kebijakan serta rencana kerja pada tahun berikutnya.

1) Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berikut :

- a. Masih Tingginya peserta KB yang memakai kontrasepsi hormonal.
- b. Masih kurangnya tenaga medis yang mengikuti pelatihan pemasangan IUD dan Implant yang berstandarisasi.
- c. Masih adanya perkawinan pertama di bawah usia 20 tahun.
- d. Kecenderungan kasus seks pranikah dan kasus kesehatan reproduksi remaja (HIV/AIDS, Narkoba) terus meningkat.
- e. Jumlah PLKB/PKB tidak seimbang dengan jumlah desa di kabupaten Lamongan sebanyak 474 Desa, sehingga rata-rata PLKB/PKB membina desa dengan perbandingan 1:8.
- f. Masih kurangnya sosialisasi dan penyebaran informasi tentang kependudukan dan pentingnya pengendalian penduduk.

2) Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif belum memiliki daya saing yang tinggi, perlu mendapatkan pelatihan dalam berbagai aspek dan bantuan alat usaha serta bantuan modal usaha
- b. Meningkatkan upaya sosialisasi dengan sasaran yang lebih luas dan mengusulkan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran yang mendukung kegiatan sosialisasi.
- c. Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi melalui Penyuluhan dan sosialisasi program KB
- d. Mengurangi terjadinya Drop Out peseta KB pada kontrasepsi non hormonal melalui pelatihan konseling program Kependudukan, KB dan

Pembangunan Keluarga dengan bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Diklat KKB.

- e. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi kepada masyarakat dan Remaja
- f. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja tentang TRIAD KRR melalui PIK Remaja.
- g. Memberdayakan Tenaga Penggerak Desa dan POS KB desa untuk membantu petugas lini lapangan.
- h. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan dinas terkait melalui leaflet dan brosur.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada urusan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 18.468.372.694,00 dan terealisasikan sebesar Rp. 16.024.937.579,00 atau 86,77 % Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

No.	Perangkat Daerah/ Prog/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
A.	Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	18.468.372.694,00	16.024.937.579,00	86,77
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7.389.284.694,00	6.990.759.268,00	94,61
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.704.410,00	98,82
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.732.040,00	98,21
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.972.370,00	99,72

No.	Perangkat Daerah/ Prog/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.535.066.294,00	6.212.950.600,00	95,07
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.505.066.294,00	6.184.592.810,00	95,07
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	13.359.800,00	89,07
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000,00	14.997.990,00	99,99
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.452.100,00	113.760.600,00	95,24
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	7.496.500,00	99,95
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.873.800,00	13.650.000,00	91,77
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.531.000,00	7.531.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.660.700,00	34.184.100,00	93,24
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.460.600,00	17.363.000,00	99,44
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	10.426.000,00	8.780.000,00	84,21
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	24.756.000,00	99,02
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	614.595.000,00	544.835.258,00	88,65
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	54.756.098,00	78,22
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	544.595.000,00	490.079.160,00	89,99

No.	Perangkat Daerah/ Prog/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.171.300,00	94.508.400,00	99,30
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.320.100,00	30.193.400,00	99,58
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.926.200,00	35.390.000,00	98,51
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.725.000,00	3.725.000,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	100.000.000,00	99.999.250,00	100,00
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	50.000.000,00	49.999.250,00	100,00
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	10.000.000,00	9.999.300,00	99,99
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	40.000.000,00	39.999.950,00	100,00



No.	Perangkat Daerah/ Prog/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	Perumusan Parameter Kependudukan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.000.051.000,00	7.956.611.486,00	79,57
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.273.620.000,00	1.866.108.714,00	82,08
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.653.000,00	80.620.100,00	99,96
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	10.000.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	165.322.000,00	113.970.400,00	68,94
	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12.120.000,00	12.120.000,00	100,00
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	2.005.525.000,00	1.659.398.214,00	82,74
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	2.816.394.400,00	2.800.270.756,00	99,43
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	500.000.000,00	484.000.000,00	96,80

No.	Perangkat Daerah/ Prog/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Belayanan, dan Pengembangan Program KKBPB untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB)	15.000.000,00	14.877.000,00	99,18
	Penggerakan Kader Insttusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.301.394.400,00	2.301.393.756,00	100,00
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	3.509.941.000,00	2.913.264.366,00	83,00
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	140.458.000,00	131.432.350,00	93,57
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.164.983.000,00	1.626.753.256,00	75,14
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.184.500.000,00	1.149.449.560,00	97,04
	Dukungan Operasional Pelayanan KB bergerak	10.000.000,00	3.631.200,00	36,31
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	10.000.000,00	1.998.000,00	19,98
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.400.095.600,00	376.967.650,00	26,92
	Penguatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15.000.000,00	14.979.000,00	99,86



No.	Perangkat Daerah/ Prog/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.385.095.600,00	361.988.650,00	26,13
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	979.037.000,00	977.567.575,00	99,85
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	979.037.000,00	977.567.575,00	99,85
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	280.000.000,00	279.895.000,00	99,96
	Orientasi dan pelatihan teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	37.500.000,00	37.439.925,00	99,84
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	614.537.000,00	613.236.750,00	99,79
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	47.000.000,00	46.995.900,00	99,99

Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana, dengan kegiatan :

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.273.620.000,- yang dipergunakan untuk

- penyuluhan keluarga berencana. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.866.108.714,00 atau 82,08 %
- b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.816.394.400,- yang dipergunakan untuk peningkatan kompetensi tenaga lini lapangan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.800.270.756,00 atau 99,43 %
 - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.509.941.000,00 yang dipergunakan untuk Pelayanan Kontrasepsi MKJP dan Peningkatan sarana penyuluhan KB. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.913.264.366,00 atau 83 %
 - d. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.400.095.600,00 adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 376.967.650,00 atau 26,92 % yang digunakan untuk pembinaan Kb Di Kampung KB dimana karena PPKM tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

2. Program Pengendalian Penduduk dengan kegiatan :

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000 yang dipergunakan untuk implementasi Pendidikan kependudukan jalur masyarakat dan Pendidikan dimana terdapat pemberian informasi sekaligus sarpras agar masyarakat luas lebih paham akan kependudukan, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.49.999.250,00.
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kotadengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,00 yang dipergunakan untuk Penyusunan profil KKBPK dan Pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB adapun realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 100 %.



- c. **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan kegiatan :**
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang digunakan untuk peningkatan pengetahuan terkait ketahanan keluarga berikut dengan pengadaan sarana prasarana yang mendukung dengan dana alokasi Rp. 979.037.000,00 yang digunakan untuk Pembinaan Kader di Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 977.567.575,00 atau 99,85 %

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan sesuai dengan *Time Schedule* dan hasil (*outcome*) yang diharapkan. Seluruh penggunaan dana dari APBD Tahun 2021, baik kegiatan bersifat rutin maupun pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efisien.

Kinerja Keberhasilan kinerja tersebut dikarenakan ada dukungan dana dari APBD, dan didukung SDM Aparatur serta kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berperan serta aktif dalam program-program perencanaan dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

Namun demikian berdasarkan kajian evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan yang dituangkan dalam LKjIP Tahun 2021 ini, masih terdapat beberapa kendala/ permasalahan antara lain:

1. Masih tingginya angka Unmeetneed yang artinya Pasangan Usia Subur (PUS) yang bukan peserta KB (tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda) dengan persentase sebesar 6,29 % , karena kondisi-kondisi sebagai berikut :
 - Belum semua akseptor KB mendapatkan pelayanan alat kontrasepsi dengan biaya gratis karena persediaan alkon dari Pemerintah masih kurang sehingga banyak peserta KB mandiri (Biaya sendiri).
 - Belum terwujudnya peningkatan partisipasi pria dalam program KB Medis Operasi Pria (MOP) dan Kondom serta anggapan kaum pria bahwa KB hanya untuk kaum wanita.
 - Belum optimalnya pembinaan di KUA karena honor yang diberikan kepada petugas KUA sangat minim.
 - Belum terwujudnya pelayanan Pap Smear bagi seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB, hal ini disebabkan oleh terbatasnya dana.

- Belum optimalnya pelaksanaan pertemuan operasional pasca persalinan, disebabkan oleh terbatasnya dana.
- Belum optimalnya pertemuan pelaksanaan pertemuan medis teknis bagi petugas pelaksana pelayanan KB disebabkan oleh terbatasnya dana.
- Belum optimalnya fungsi Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub Pembantu Pembina KB Desa (sub PPKBD) disebabkan kurangnya dana stimulasi untuk operasional.

4.2 Saran

Untuk peningkatan kinerja ditahun-tahun yang akan datang agar lebih berhasil lagi kiranya perlu dukungan penuh dari Pemerintah Daerah baik dari aspek personal, sarana dan prasarana serta dana dan peran yang lebih pro aktif para pelaksana. Secara operasional kiranya dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantapan dan keterpaduan program.
2. Meningkatkan sarana Advokasi kepada pihak terkait (formal maupun informal, tokoh masyarakat, agama dan pihak-pihak lain) dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap program.
3. Memaksimalkan peran Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub Pembantu Pembina KB Desa (sub PPKBD) di lapangan yang memberikan informasi dan bantuan melalui pendidikan dan kegunaan alat kontrasepsi.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya.

Lamongan, Desember 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN

UMURONAH, S.ST., M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19721111 199203 2 010